

KENDALA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KPH RINJANI BARAT (Problems and Implementation Strategy of Rinjani Barat Forest Management Unit Development)

Oleh / By : Elvida YS dan Iis Alviya
Peneliti di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan
Jalan Gunung Batu No. 5, Bogor, Jawa Barat
Telp. (0251) 8633944 Fax. (0251) 8634924
E-mail: elvida@yahoo.com

Naskah diterima : 13 Januari 2009 / Edit terakhir : 25 Februari 2009

ABSTRACT

The past forest management policy that mainly focused on the forest product extraction for the country development the issuance of caused problems economic, social, and environment problems. One of the strategies to overcome those problems, is policy for Forest Management Units (FMU) development called KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) which has been released by the Indonesian government.

The aims of this study are: (1) To analyze the implementation of KPH Rinjani Barat development, (2) To formulate a strategy in the development of KPH Rinjani Barat and (3) To analyze the role of KPH managers and other stakeholders in KPH Rinjani Barat development. Data were collected through depth interviews and literature study. The collected data were analyzed by using descriptive and SWOT analyses.

The results show that the development of KPH Rinjani Barat has not been implemented because of limited human resources, budget, district regulation (PERDA) supports, and community claims of land. The involved stakeholders in KPH development are province and district forest service (dinas kehutanan), BPDAS, NGO, university, community, Bapeda, KPH management, and investors that have economic in forest. The prepared strategies are: (1) making the best use of community strength and forest to fulfill log demand, for instance the development of community forest (HTR) in production forest, (2) University and NGO should assist the district government to formulate the suitable action plan of KPH management particularly in the utilization of forest area to increase the timber product.

Keywords: Implementation, stakeholders, strategy, and KPH development

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan hutan di masa lalu, yaitu ketika hasil hutan dijadikan andalan dalam meningkatkan perekonomian negara telah menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mewujudkan kelestarian hutan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan KPH.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji permasalahan dalam implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat, (2) menyusun strategi dalam pembangunan KPH Rinjani Barat dan (3) mengetahui peran antara pengelola KPH dengan stakeholder lain dalam pembangunan KPH Rinjani Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif dan SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat terhambat disebabkan antara lain karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, belum adanya dukungan PERDA, dan adanya klaim lahan oleh masyarakat. Adapun stakeholder yang terlibat dalam

pembangunan KPH Rinjani Barat antara lain adalah Dishut propinsi dan kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bapeda, calon KPH sendiri dan dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi yang diperlukan dalam pembangunan KPH Rinjani Barat adalah (1) Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan pemanfaatan lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu, misal HTR di kawasan HP, (2) Akademisi dan LSM membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH dan Draft rancang bangun diselaraskan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan kayu pertukangan

Kata kunci: Implementasi, pemangku kepentingan, strategi, dan pembangunan KPH

I. PENDAHULUAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mewujudkan kelestarian fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan dari hutan dapat berjalan secara efisien dan optimal. Program pembangunan KPH diawali dengan merumuskan Draft SK atas 7 KPH Model di Indonesia diantaranya adalah KPH Rinjani Barat. Wacana fokus kegiatan pembangunan KPH secara bertahap mulai tahun 2006 - 2009 dengan tahapan: persiapan pembangunan KPH Model tahun 2006, pembangunan KPH Model tahun 2007, pengembangan KPH tahun 2008, dan validasi dan formalisasi KPH Model menjadi KPH (Baplan, 2007). Namun demikian, hingga saat ini proses pembangunan KPH banyak mengalami hambatan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan KPH antara lain adalah: 1) belum dipahaminya dan belum sinerginya Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dalam pembentukan KPH, 2) Perbedaan kesiapan di masing-masing daerah, 3) Belum disepakatinya bentuk organisasi KPH dan (4) Sumberdaya manusia (Kartodiharjo, 2008).

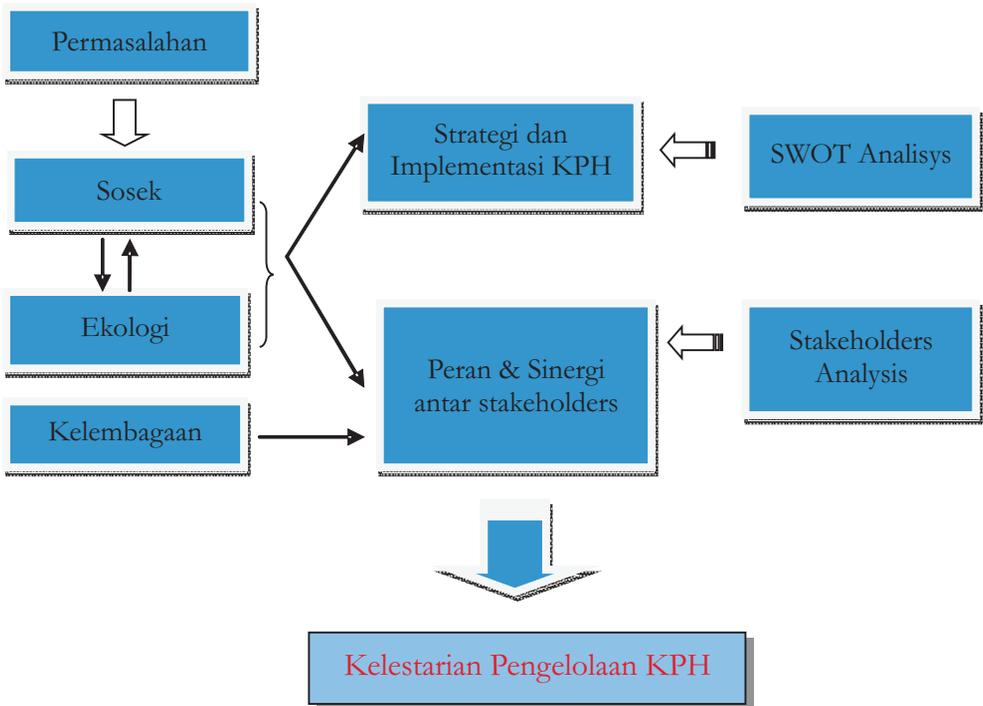
Selain itu, hasil penelitian Suryandari *et al.*, (2009) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang ditemui di lapangan terkait dengan pembangunan KPH antara lain adalah faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang meliputi belum bersinerginya antara *stakeholder* yang terkait dalam membangun KPH dan rancangan perencanaan yang belum optimal sehingga implementasi pembangunan KPH yang masih rendah. Hasil penelitian Prahasto *et al.*, (2008) sebagian besar kawasan KPH yaitu KPH Model Way Terusan (Lampung) dan KPH Model Sungai Merakai (Kalbar) telah diokupasi oleh masyarakat sehingga dalam membangun KPH harus melibatkan partisipasi aktif *stakeholder* lain dan masyarakat untuk menghindari konflik di masa yang akan datang. Dalam membangun KPH belum ada sinergi antar instansi pemerintah di daerah, sehingga pembangunan KPH yang dilakukan selama ini masih terbatas dilakukan oleh dinas kehutanan dan perkebunan.

Banyak informasi yang diperlukan untuk melandasi berbagai analisis peran pemangku kepentingan yang terkait permasalahan dalam pembangunan KPH dan strateginya kedepan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mengkaji permasalahan dalam implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat, (2) menyusun strategi dalam pembangunan KPH Rinjani Barat dan (3) mengetahui peran dan sinergi antara pengelola KPH dengan *stakeholder* lain dalam pembangunan KPH Rinjani Barat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini, permasalahan dan hambatan dalam pembangunan KPH dibedakan menjadi tiga (3) kategori yaitu permasalahan Sosial ekonomi, ekologi dan kelembagaan. Diduga bahwa faktor sosial ekonomi, ekologi dan kelembagaan mempengaruhi strategi dan implementasi KPH dan peran serta sinergi antar *stakeholder*. Untuk menganalisis strategi dan implementasi KPH akan digunakan analisis SWOT, sedangkan untuk mengkaji peran dan sinergi antar stakeholder dalam pembangunan KPH menggunakan analisis *stakeholders*. Secara keseluruhan analisis akan diarahkan kepada tujuan utama yaitu tercapainya kelestarian pengelolaan KPH. Adapun kerangka analisis penelitian



Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian
(Figure) (Logical framework of study)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lebih diarahkan pada lokasi KPH yang memiliki keunikan dalam pengelolaan jasa lingkungannya dan merupakan KPH model, yaitu KPH Rinjani Barat (Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat). KPH model sebagai embrio KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju bentuk riil KPH di tingkat tapak. KPH model nantinya dijadikan sebagai proses pembelajaran dan diharapkan dapat terbentuknya KPH di wilayah lainnya.

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei pada KPH Rinjani Barat di Kabupaten Lombok Barat. Tujuan metode survei adalah untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala permasalahan-permasalahan dalam pembangunan KPH melalui pengambilan sejumlah sampel. Metode pengambilan sample didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (*purposive sampling*). Pemilihan responden didasarkan pada posisi dan penguasaan pengetahuan/kemampuan responden terlibat dalam pembangunan KPH. Masing-masing 5 (lima) responden untuk setiap *stakeholder* yang berasal dari Dinas Kehutanan propinsi, Dinas Kehutanan kabupaten, Universitas, tokoh masyarakat dan LSM.

Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara secara langsung kepada informan dengan menggunakan daftar pokok-pokok pertanyaan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait dalam pembangunan KPH; baik berupa gambaran umum kawasan, informasi terkait sosial ekonomi dan kelembagaan, implementasi pembangunan KPH Rinjani Barat.

D. Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *stakeholder* dan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengidentifikasi kepentingan dan peran berbagai *stakeholder* dengan tujuan akhir dapat memberikan rekomendasi strategis untuk melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan (Lassa dan Yus, 2007). Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk mendapatkan strategi dalam pembangunan KPH sesuai dengan permasalahan yang terdapat di lapangan. Analisis SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan maupun strategi dalam implementasi program-program di bidang kehutanan. Proses penggunaan analisa SWOT menghendaki adanya suatu survei internal tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) program, serta survei eksternal atas *opportunities* (ancaman) dan *threats* (peluang/kesempatan) (Marimin, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kawasan Hutan di Kabupaten Lombok Barat

Potensi sumberdaya hutan Kabupaten Lombok Barat dengan luas kawasan hutan 79.243,2 ha atau sama dengan 46,5% dari luas wilayah daratan, terdiri dari hutan lindung

seluas 31.429, 56, 5 ha, hutan produksi terbatas 19.624 ha, hutan produksi biasa seluas 12.982 ha, hutan taman wisata alam seluas 3.043,7 ha, taman nasional Gunung Rinjani seluas 12.164 ha, taman hutan raya (Tahura) seluas 3.155 ha. Secara rinci luas hutan Kabupaten Lombok Barat dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Luas hutan berdasarkan fungsinya di Kabupaten Lombok Barat (Table 3). (*Forest area by its function in West Lombok District*)

No.	Fungsi Hutan/ <i>Forest function</i>	Luas/Area (Ha)
1.	Hutan Lindung	31.429,5
2.	Hutan Produksi Terbatas	19.624
3.	Hutan Produksi Biasa	12.982
4.	Hutan Taman Wisata Alam	3.043,7
5.	Taman Nasional	12.164
	Jumlah / Total	79.243,2

Sumber (*Source*): Dishut Lobar, 2007 (*Forest service of Lobar, 2007*)

Kondisi kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat saat ini, baik hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi (taman wisata alam, taman nasional dan Tahura) berada pada tingkat yang mengkhawatirkan sebagai akibat dari masih adanya penebangan liar, perambahan dan okupasi lahan. Sebagai akibatnya luas lahan kritis hingga tahun 2004 telah mencapai 16.133,20 ha

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan diatas antara lain dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Propinsi Nusa Tenggara Barat termasuk kabupaten Rinjani Barat. Kawasan hutan di Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 29 KPH, yang meliputi 6 KPH di P.Lombok dan 23 KPH di P. Sumbawa. Sedangkan KPH yang ditetapkan sebagai model adalah KPH Rinjani Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 147 tahun 1999 tentang Pembagian Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai di Satuan Wilayah Sungai Lombok dan Satuan Wilayah Sungai Sumbawa, diketahui bahwa wilayah kelola KPH Rinjani Barat terletak didalam wilayah DAS Dodokan dan DAS Putih. Secara administrasi KPH ini terletak pada Kecamatan Narmada, Gunung Sari, Pemenang, Tanjung, Gondang, Rinjani Barat dan Kayangan ,Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan kelompok hutan kawasan KPH Rinjani Barat terbagi dalam 3 kelompok yaitu: Rinjani (42.177,53 ha), Pandan Mas (1.370 ha) dan Ranget (2,7 ha) sehingga total seluruh kawasan mencakup 43.550,23 ha. KPH Rinjani barat terdiri dari: 27.606,41 ha hutan lindung, 6.984,38 ha hutan produksi terbatas dan 4.431,74 ha hutan produksi tetap.

Pembagian wilayah KPH didasarkan pada 3 pendekatan utama yaitu: (1) wilayah ekosistem secara spasial, (2) pembagian kewenangan dan (3) kemampuan dalam pengelolaan hutan. Dalam wilayah KPH ini terdapat banyak kegiatan seperti HKm, hutan cadangan pangan, pengembangan pusat Gaharu, rehabilitasi *catchment area*, pengembangan eks HPH dan hutan adat dan lain-lain seperti dijelaskan sebagai berikut. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kawasan KPH Rinjani Barat antara lain yaitu: (1) HKm Desa Santong seluas 721 ha, (2) Rencana Pembangunan PLTA 600 ha, (3) Rehabilitasi Catchment Area seluas 252 ha, (4) Pengembangan tanaman gaharu oleh Universitas Mataram, (5) Pengembangan tanaman unggulan lokal seluas 571 ha, (6) Rehabilitasi eks HPH 215 ha dan (7) Uji coba penanaman tanaman bawah tegakan seluas 10 ha (kakao, vanili dan kopi).

A. Strategi Pembangunan KPH Rinjani Barat

1. Permasalahan dalam pengembangan KPH Rinjani Barat

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KPH Model KPH Rinjani Barat saat ini yaitu ketersediaan kayu (*standing stock*) dan *sustainability* untuk jenis tanaman unggulan lokal, perambahan hutan oleh masyarakat hingga keberadaan hutan adat. Untuk mendukung ketersediaan kayu tidak hanya mempertimbangkan jenis tertentu tetapi juga jenis unggulan lain di Kabupaten Lombok Barat seperti Sengon, Bujur, Rajumas dan Mahoni yang sesuai dengan tempat tumbuh di masing-masing kawasan. Selain itu, pembangunan model KPH harus juga mempertimbangkan penyelesaian persoalan yang belum tuntas di tingkat lapangan seperti status dan keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), maupun keberadaan bentuk pemanfaatan lainnya. Tantangan lainnya, keterbatasan SDM latar belakang pendidikan kehutanan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana pendukung sampai saat ini menjadi kendala pemerintah daerah untuk mengimplementasikan KPH Rinjani Barat.

Sedangkan permasalahan sosial secara umum di dalam kawasan KPH Rinjani Barat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan Dalam KPH Rinjani Barat
(Table 2). (*The problems identified in Rinjani Barat KPH*)

No	Permasalahan (<i>Problems</i>)	Luas (ha) (<i>Area</i>)	Lokasi (<i>Location</i>)
1	Pemanfaatan kawasan untuk pembangunan PLTM	18	Santong
2	Perambahan	600	Senjajak
3	Sertifikasi kawasan	81	Rempek
4	Rencana Hutan Adat	30	Bentek
5	Illegal logging	-	Sesaot, Santong

Sumber (*Source*): Dishut NTB, 2007 (*Forestry service of NTB, 2007*)

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi dalam pembangunan KPH. Hasil skoring faktor internal dan eksternal dalam pembangunan KPH seperti disajikan pada Tabel 3, berdasarkan pendapat stakeholder yaitu Dishut Lombok Barat dan Dishut NTB. Secara lengkap skoring disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor Evaluasi Faktor internal (IFE) dan Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)
 (Table) (The score of internal factors evaluation and external factors evaluation)

Faktor internal & Eksternal (Internal and External factor)	Skor (Score)
Kekuatan (Strength)	
Adanya komitmen pemerintah pusat & daerah	0,626
Adanya perundangan yg terkait pembangunan KPH	0,774
Terdapat draft rancang bangun KPH	1,398
Adanya kawasan hutan (<i>dejure</i>) yang cukup luas	0,810
Tersedianya aksesibilitas jalan di dalam kawasan hutan	0,235
Total Skor Kekuatan (Total score)	3,842
Kelemahan (Weakness)	
Lemahnya koordinasi & kooperasi dengan stakeholder lain	0,242
Desentralisasi belum berjalan sesuai harapan	0,395
Tingginya egosektoral dalam pembangunan KPH	0,138
Keterbatasan SDM	0,872
Keterbatasan anggaran	0,529
Belum ada dukungan PERDA	0,414
Belum seluruh kawasan KPH ditata batas	0,218
Komitmen pengusaha & masyarakat	0,459
Total Skor Kelemahan (Total score)	3,266
Total Faktor Internal (Total internal factor)	0,577
Peluang (Opportunity)	
Dukungan LSM dan universitas	1,402
Besarnya permintaan bahan baku kayu oleh industri perikanan	0,464
Tingginya harga kayu di masa depan	0,693
Potensi PAD dan devisa negara	0,828
Dukungan internasional pada pengelolaan hutan lestari	0,367
Total Skor Peluang (Total score)	3,753
Ancaman (Threat)	
Klaim lahan oleh masyarakat	0,849
Masih ada perladangan berpindah sekitar KPH	0,928
Perubahan peruntukan hutan	0,408
Degradasi hutan akibat kebakaran dan illegal logging.	0,641
Total Skor Ancaman (Total score)	2,825
Total Faktor Eksternal (Total external factor)	0,928

Berdasarkan Tabel 3, lokus hasil skoring yaitu dengan koordinat (0.577; 0,928) yang berada pada kuadran 1 yaitu strategi SO (Tabel 4). Kuadran ini berada dalam posisi yang menguntungkan dimana kekuatan dan peluang lebih besar dibanding kelemahan dan ancaman yang akan muncul dalam pembangunan KPH. Adapun strategi yang sesuai dengan kondisi ini adalah strategi SO. Dengan kondisi ini, maka strategi yang bisa dikembangkan adalah kebijakan yang agresif yaitu strategi untuk menggunakan kekuatan sekaligus dapat memanfaatkan peluang (Tabel 4).

Adapun strategi dalam pembangunan KPH secara umum digambarkan dalam matriks SWOT Tabel 4.

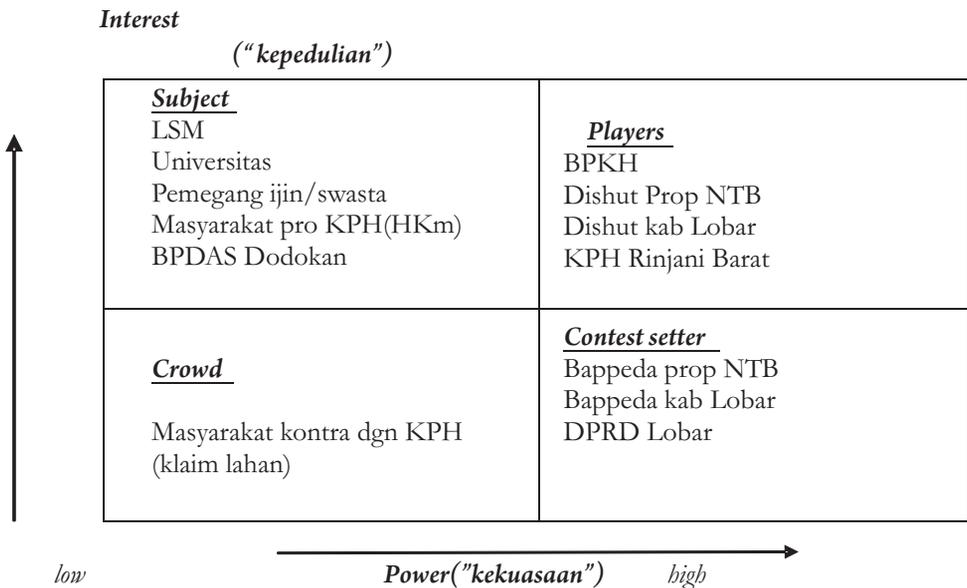
Tabel 4. Matriks SWOT KPH Rinjani Barat
(Table 4). (SWOT matrices Rinjani Barat KPH)

<p>Faktor Internal (Internal Factors)</p> <p>Faktor Eksternal (External Factors)</p>	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah pusat & daerah 2. Adanya perundangan yg terkait pembangunan KPH 3. Terdapat draft rancang bangun KPH 4. Adanya kawasan hutan (dejure) yang cukup luas 5. Tersedianya aksesibilitas jalan di dalam kawasan hutan 	<p>Kendala/K kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya koordinasi & Kooperasi dengan <i>stakeholder</i> lain 2. Desentralisasi belum berjalan sesuai harapan 3. Tingginya egosektoral dalam pembangunan KPH 4. Keterbatasan SDM 5. Keterbatasan anggaran 6. Belum ada dukungan PERDA 7. Belum seluruh kawasan KPH ditata batas 8. Komitmen pengusaha dan masyarakat
<p>Peluang (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Universitas dan LSM 2. Besarnya permintaan bahan baku kayu oleh industri perkayuan 3. Tingginya harga kayu dimasa datang 4. Dukungan internasional pada pengelolaan hutan lestari 5. Potensi PAD dan devisa negara 	<p><i>Strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang (SO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan luasnya lahan untuk memanfaatkan lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu, misal HTR di kawasan HP. • Akademisi dan LSM membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH. • Draft rancang bangun diselaraskan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan kayu pertukangan (ex: Rajumas) 	<p><i>Strategi meminimasi kendala/ kelemahan dengan memanfaatkan peluang(WO)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM lokal dalam pengelolaan KPH dengan bekerjasama dengan universitas. • Peningkatan komunikasi dan konsultasi multipihak • Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan sektor lain
<p>Tantangan/Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim lahan oleh masyarakat 2. Masih ada perladangan berpindah sekitar KPH 3. Perubahan peruntukan hutan 4. Degradasi hutan akibat kebakaran dan illegal logging 	<p><i>Strategi memakai kekuatan mengatasi tantangan/ ancaman (ST)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kekuatan masyarakat dalam pengelolaan KPH, dengan melibatkannya dalam program-program rancangan KPH. • Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk melibatkan masyarakat, sehingga dapat meminimasi perladangan berpindah oleh masyarakat. • Dukungan perundangan tentang KPH sebagai bahan rujukan institusi pengelola KPH 	<p><i>Strategi memperkecil kelemahan dan mengatasi tantangan/ ancaman (WT)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dengan membangun kemitraan dengan swasta. • Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM lokal dalam pengelolaan KPH melalui training-training. • Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan masyarakat seperti koperasi. • Mendorong iklim berinvestasi yg kondusif sehingga investor tertarik untuk bermitra dalam pembangunan KPH.

3. Peran dan sinergi antara pengelola KPH dengan stakeholder lain

a. Analisis Stakeholder (*Interest VS Power*)

Analisis ini dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut *Interest* (minat) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *Power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut (Bryson, 2003). Keberhasilan suatu program yang melibatkan *stakeholder* lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. *Interest*/minat adalah: minat atau kepentingan *stakeholder* terhadap keberhasilan pembangunan KPH. Sedangkan yang dimaksud dengan *Power* adalah: Kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan KPH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Matriks Analisis *Stakeholder* dalam Pembangunan KPH Rinjani Barat
(*Figure*) (*The matrix of stakeholders analysis in the development of Rinjani Barat KPH*)

Penjelasan dari penempatan *stakeholder* pada matriks di atas adalah sebagai berikut:

1. *Subject*

Subject adalah organisasi yang mempunyai minat besar namun memiliki kekuasaan yang rendah. *Subject* bisa diartikan sebagai organisasi yang peduli terhadap kegiatan pembangunan KPH yang mempunyai kesungguhan lebih baik walaupun tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi atau membuat peraturan-peraturan. Yang termasuk dalam *subject* adalah: LSM, pemegang ijin, Universitas, masyarakat yang pro KPH dan BPDAS Dodokan.

2. *Players*

Players adalah mereka yang mempunyai minat besar dan kekuasaan yang besar. *Players* bisa diartikan sebagai pemain utama dalam kegiatan pembangunan KPH. Instansi/lembaga ini mempunyai kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu atau membuat aturan untuk pengelolaannya yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah : Dishut Propinsi NTB, Dishut Kabupaten Lobar dan BPKH. *Stakeholder* ini memiliki kepentingan dan kekuasaan yang besar, disebabkan oleh faktor-faktor: (1) memiliki sumberdaya manusia berlatar belakang kehutanan, mempunyai mobilitas yang tinggi, dan dapat mempengaruhi aturan yang berkaitan dengan KPH. Dishut propinsi dan kabupaten mempunyai kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya dan dapat menjadi leader dalam keberhasilan pembangunan KPH ini.

3. *Contest Setter*

Kelompok ini mencakup Bappeda Propinsi NTB, Bappeda Kabupaten Lobar dan DPRD Lobar. Bappeda mempunyai kekuasaan untuk mengatur tata ruang dalam wilayahnya akan tetapi punya minat yang rendah, karena tidak secara langsung berkaitan dengan kehutanan. Demikian juga DPRD mempunyai kekuasaan besar dalam penyusunan PERDA terkait, akan tetapi lebih kepada melihat apakah kegiatan KPH kedepan akan memberikan keuntungan kepada daerah misalnya terhadap PAD. Pihak-pihak ini belum bisa menjadi leader dalam kegiatan ini karena pengetahuan mengenai kehutanan khususnya KPH kurang dan tidak memiliki SDM kehutanan, akan tetapi pihak ini tidak menjadi pihak yang menentang adanya KPH.

4. *Crowd*

Crowd adalah mereka (Instansi/lembaga/masyarakat) yang mempunyai minat kecil dan kekuasaan yang kecil. Pada kotak ini dimasukkan masyarakat atau lembaga yang kurang peduli atau minatnya kecil terhadap kegiatan pembangunan KPH.

b. Peran *Stakeholder* dalam Pembangunan KPH

Dalam pembangunan KPH Rinjani Barat melibatkan *stakeholder* antara lain seperti BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda dan calon dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi. Adapun peran *stakeholder* yang seharusnya terlibat dalam pembangunan KPH mulai perencanaan, pelaksanaan dan money disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Peran Stakeholder yang seharusnya terlibat dalam Pembangunan KPH Rinjani Barat (Table 5). (*Stakeholders involvement in the development of Rinjani Barat KPH*)

No	Instansi (<i>Institution</i>)	Peran (<i>Role</i>)	Kegiatan (<i>Activities</i>)
1	BPKH	Perencanaan dan monev	Tata batas
2	Dishut kab	Perencanaan, pelaksanaan dan monev	
3	Dishut propinsi	Perencanaan, pelaksanaan dan monev	
4	KPH Rinjani Barat	Perencanaan, Pelaksanaan dan monev	Rehabilitasi, tegakan rajumas, Gaharu, rehabilitasi hutan lindung,
5	Bappeda kabupaten	Perencanaan dan monev	Perencanaan tata ruang
6	Bappeda propinsi	Perencanaan dan monev	Perencanaan tata ruang
7	BPDAS Dodokan	Perencanaan, pelaksanaan dan monev	GNRHL, HKm
8	LSM	Monev	Sebagai fasilitator dlm penyuluhan dan teknik budidaya kayu dan gaharu
9	Pemegang ijin/ swasta	Pelaksanaan	Investasi usaha pengembangan kayu, gaharu dan jasa lingkungan
10	Universitas	Monev	Pengembangan gaharu
11	Masyarakat	Pelaksanaan	HKm, hutan adat

Dari Tabel 5 terlihat bahwa yang seharusnya berperan dalam perencanaan pembangunan KPH adalah BPKH, Dishut Kab dan Propinsi NTB, Bappeda kab/prop dan BPDAS Dodokan. Tabel tersebut memberikan gambaran untuk dasar pertimbangan mengenai *stakeholder* mana saja yang perlu dilibatkan dalam pembangunan KPH didalam perencanaan, pelaksanaan dan monev.

Kondisi saat ini KPH Rinjani Barat, belum operasional dalam hal pelaksanaan pengelolannya; baru pada tahap perencanaan dalam rangka membangun KPH. Pada kenyataannya, yang sangat berperan dalam perencanaan adalah BPKH dan Dishut Propinsi NTB. Salah satu alasan kurang terlibatnya Dishut Kabupaten Lobar adalah kurangnya kompetensi SDM bidang kehutanan. SDM dengan kompetensi kehutanan yang baik lebih banyak terpusat di Dishut Propinsi NTB. Sedangkan instansi lain di luar itu belum secara intensif dilibatkan, sejauh ini Dishut Propinsi NTB hanya memberikan informasi kepada instansi lain mengenai adanya program pembangunan KPH di Lombok Barat. Hingga saat ini belum dilakukan penyelarasan kegiatan antara penyusunan rencana pengelolaan KPH dengan kegiatan lain mengingat keberadaan KPH dalam satu DAS Dodokan.

Sedangkan yang berperan dalam pembangunan KPH adalah calon KPH Rinjani Barat, calon pemegang ijin/swasta, masyarakat dan BPDAS Dodokan. Nantinya, perlu adanya kolaborasi yang baik antara KPH dan pemegang ijin, agar pengelolaan hutan secara lestari dapat tercapai. Demikian juga, perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat untuk mendukung pembangunan KPH. Hal ini penting dilakukan, karena masyarakat telah lama bermukim dalam kawasan hutan di KPH ini dan menggantungkan hidup pada hutan. Apabila

terjadi konflik dengan masyarakat, pembangunan KPH akan menemui hambatan yang secara sosial sulit untuk diatasi. Perlu meyakinkan masyarakat, bahwa dengan keberadaan KPH tidak akan menghalangi akses masyarakat ke hutan (memanfaatkan seperti HKM) sepanjang tidak merusak kelestarian hutan. Instansi yang seharusnya berperan dalam monitoring dan evaluasi adalah Dishut propinsi dan kabupaten, Bappeda propinsi dan kabupaten, LSM, universitas dan BPDAS. Hingga saat ini pembangunan KPH ini belum terlaksana, sehingga kegiatan monev belum terlaksana.

c. Partisipasi *Stakeholder* dalam Pembangunan KPH

Di lain pihak untuk mendukung sinerginya suatu antar *stakeholder* dalam pembangunan KPH dapat dilihat dari hubungan antar *stakeholder*. Hal ini digambarkan dalam matrik perencanaan partisipasi masing-masing *stakeholder* (Tabel 6).

Tabel 6 . Matriks perencanaan partisipasi dalam pembangunan KPH
(Table 6). (*The matrix of participation plan in KPH development*)

Jenis Partisipasi pembangunan KPH	Memberikan Informasi	Mengkoordinasikan/Mensinkronkan program terkait	Kolaborasi	Pemberdayaan
Tahap Perencanaan	BPKH, Dishut prop dan kabupaten	KPH Rinjani Barat, BPKH, Dishut prop & kab, BPDAS, Bappeda kab dan prop,	Unram	
Tahap Pelaksanaan		(KPH Rinjani Barat), Dishut prop dan kab, BPDAS	Dishut prop dan kab, BPDAS, pemegang ijin, (KPH Rinjani Barat)	Masyarakat dlm & sekitar KPH
Tahap Monev		Dishut prop & kab, BPDAS	Unram, LSM	

Matriks perencanaan partisipasi akan membantu mendorong adanya partisipasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan KPH. Hingga saat ini organisasi KPH Rinjani Barat, apabila institusi ini telah terbentuk, maka sangat berperan dalam pelaksanaan KPH mulai dari kegiatan koordinasi hingga kolaborasi dengan pihak lain.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembangunan KPH tidak mudah untuk diimplemetasikan karena beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan secara serius. Dari hasil SWOT menunjukkan bahwa permasalahan internal dalam pembangunan KPH Rinjani Barat yaitu (1) keterbatasan SDM, (2) Keterbatasan anggaran dan (3) Belum ada dukungan PERDA. Sedangkan dari sisi eksternal permasalahan dalam pembangunan KPH Rinjani Barat meliputi klaim lahan oleh masyarakat dan adanya perladangan berpindah. Sehingga rekomendasi untuk strategi pembangunan KPH ini adalah: (1) Pemanfaatan kekuatan masyarakat dan luasnya lahan untuk memanfaatkan lahan dalam upaya memenuhi permintaan kayu, misal HTR di kawasan HP, (2) Akademisi dan LSM membantu menyusun draft rancangan rencana pengelolaan KPH dan draft rancang bangun KPH diselaraskan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan kayu pertukangan.

Stakeholder yang terlibat dalam pembangunan KPH Rinjani Barat antara lain adalah Dishut propinsi dan kabupaten, BPDAS, LSM, universitas, masyarakat, Bappeda, calon KPH sendiri dan calon dunia usaha yang akan mendukung pembangunan KPH dalam aspek ekonomi (saat ini dunia usaha belum ada). Kenyataannya peranan Dishut NTB lebih dominan dalam pembangunan KPH, karena dari segi SDM banyak terpusat disini. Di lain pihak, stakeholder lain kurang dilibatkan dalam pembangunan KPH.

B. Saran

Salah satu permasalahan yang terjadi di KPH Rinjani Barat adalah kurangnya partisipasi antar stakeholder terkait. Upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong partisipasi semua pihak mulai bagaimana menginformasikan mengenai KPH, melakukan koordinasi, kolaborasi yang pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPH serta mensinkronkan kegiatan yang terkait antar *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baplan, 2007. Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan (KPH). ModulLoka Latih Pembangunan KPH. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Baplan 2007. Pedoman Pembangunan KPH Model : sebagai Tahap Awal Pembangunan Wujud Riil KPH di Tingkat Tapak. Badan Planologi Kehutanan, DEPHUT. Jakarta.
- Baplan, 2007. Manual KPH. Baplan Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Bryson, JM. 2003. *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London.
- Dishut NTB. 2007. Statistik Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dishut NTB, Lombok.
- Dishut Lombok Barat. 2007. Laporan Kondisi Hutan di Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kehutanan Lombok Barat, Gerung.

- Kartodiharjo H, 2008. Kerangka Hubungan Kerja antar Lembaga Sebelum dan Setelah Adanya KPH: Upaya Peningkatan Investasi dan Efektivitas Pengelolaan Hutan. Laporan Project: Strengthening the Management Capacities in The Ministry of Forestry.
- Lassa J dan Yus N. 2007. Stakeholder Analysis Dalam CBDRM: TOT BBDRM HIVOS Aceh Program. Aceh.
- Marimin, 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Grasindo. Jakarta.
- Prahasto H, Elvida YS dan I Alviya. 2008. Kajian Konsepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dalam Kerangka desentralisasi. (Laporan Hasil Penelitian Tahun 2007). Puslitsosek-DEPHUT. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Suryandari, EY, I. Alviya, and H. Prahasto, 2009. Kajian Rancangan dan Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Laporan Hasil Penelitian Tahun 2008). Puslitsosek-Dephut. Bogor. Tidak diterbitkan.